

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: **14** /OT.01.02/NB.05/7/2025

TENTANG

PENEMPATAN TUGAS CPNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran tugas rutin dan insidental kesekretariatan dipandang perlu mendistribusikan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas untuk CPNS dan tenaga PPPK di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Lombok Timur;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas CPNS dan tenaga PPPK perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4869.1/KP.01.01/SJ/05/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menugaskan CPNS dan tenaga PPPK sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Melaksanakan setiap tugas tambahan yang diberikan pimpinan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 07 Juli 2025

KEPALA SEKRETARIAT,

JUNAIDI S.Sos.
NIP. 19681231 199003 1 079

Tembusan Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur
 Nomor : 14/OT.01.02/NB.05/7/2025
 Tanggal : 07 Juli 2025

PENEMPATAN TUGAS CPNS DAN PPPK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB TAHUN 2025

No	Divisi/ Nama	Tugas	Keterangan
1	2	3	4
1	Ade Novensi Nurmalia, SE Perencana Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan)	a. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP); b. Operator Srikandi khusus SPT Divisi SDMO; c. Mengelola dokumen SPT dan SPJ Perjadin dan Kegiatan SDMO dan Diklat; d. Operator Kepegawaian; e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
2	Suparman, S.Pd Arsiparis Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan)	a. Operator SIAPPP (Sistem Informasi Aplikasi Pendaftaran Pengawas Pemilu); b. Pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS pada Pemilu dan Pilkada serta kesekretariatan Pengawas Adhock; c. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan (pengawas dan sekretariat Adhock); d. Pendokumentasian hasil pengawasan (Form A) Tahapan PIC SDMO Diklat; e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
3	Muhammad Hifzul Muzakkir Insari, S.Kom Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan)	a. Penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; b. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan; c. Pelaksanaan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; e. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan Laporan Akhir Divisi SDMO dan Diklat; f. Melaksanakan tugas Lain sesuai perintah atasan.
4	Masari Dewi Nursasih, SE PKPP Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan)	a. Operator Srikandi khusus Surat-Menyurat Semua Divisi (e-ttd Kasek); b. Pengadministrasian surat masuk dan keluar; c. Digitalisasi arsip; d. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.

5	Andi Musakkir Pengadministrasian Perkantoran	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan)	a. Administrasi kantor pada Bagian umum; b. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
6	Lalu Mustiada Pengadministrasian Perkantoran	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan)	a. Administrasi kantor pada Bagian umum; b. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
7	Muhamad Kamalul Badri, S.Ak Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Pelaksana Teknis CPNS, Subbag Administrasi (Keuangan)	a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan (RAB & TOR); b. Operator Pajak; c. Operator Piutang Persediaan Aset (BMN); d. Operator Srikandi SPT Bagian Administrasi; e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
8	Budiawan, S.E. Perencana Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Keuangan)	a. Pengelolaan RAB dan pengajuan RPU (Rencana penarikan Uang) Divisi SDMO; b. Menyusun Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja. c. Operator SPPD Bagian Administrasi; d. Operator Anggaran dan Pelaporan; e. Absensi Pegawai Bawaslu Kab Lotim; f. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
9	Baiq Desi Sundari, S.Pd Arsiparis Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Administrasi (Keuangan)	a. Mengelola Arsip pertanggungjawaban administrasi keuangan; b. Operator pembayaran; c. Operator SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan); d. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
10	Muh. Ainul Maulana M, S.H PKPP Ahli Pertama	Pelaksana Teknis CPNS, Subbag Pengawasan Pemilu (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat).	a. Pengelolaan RAB dan Pengajuan RUP Divisi Pencegahan ; b. Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga; c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan; d. Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu; e. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; f. Mendokumentasikan Form A hasil pengawasn PIC Divisi Pencegahan; g. Operator SPPD Divisi P2H; h. Operator Srikandi SPT Divisi pengawasan; i. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
11	Muazin, SE Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Pengawasan Pemilu (Divisi Pencegahan,	a. Pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

		Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat).	b. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; c. Mendokumentasikan Form A hasil pengawsan PIC Divisi Pencegahan; d. Menyusun SPT dan SPJ (Perjadin, Kegiatan) Divisi Pencegahan; e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
12	Lalu Abdul Aziz Munandar, S.IP PKPP Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Pengawasan Pemilu (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat).	a. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga; b. Pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; c. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; d. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
13	M. Khairil, S.H. PKPP Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Pengawasan Pemilu (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat).	a. Pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; b. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan; c. Menyusun laporan Akhir Divisi Pencegahan, maupun Laporan PIC pada setiap akhir tahapan; d. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
14	Qaderi, S.Sos Pranata Humas Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Hukum, Humas, Datin (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat).	a. Mengelola media sosial (Facebook, Tiktok, Website/berita dll) dan konten kehumasan; b. pengelolaan pemberitaan dan publikasi seluruh kegiatan Divisi Bawaslu Kab Lotim; c. Menyusun laporan akhir Kehumasan; d. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
15	Baiq Dewi Yanti Wahyuni, SE Penata Layanan Operasional	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Hukum, Humas, Datin (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat).	a. Operator Srikandi khusus surat-menyurat semua divisi (e-Ttd Ketua); b. Mengelola Media Sosial (Instagram) Dan Konten Kehumasan; c. Perencanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Kehumasan; d. Menyusun Laporan Akhir Kehumasan; e. Staf Khusus Ketua; f. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
16	Muhammad Irpan, S.H. PKPP Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag PP dan Penyelesaian Sengketa Proses (Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi).	a. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; b. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; c. Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; d. PIC Sigap Lapor;

			e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
17	Fharuk Panji Saputra, S.H. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag PP dan Penyelesaian Sengketa Proses (Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi).	a. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; b. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu; c. Penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; d. Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; e. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; f. PIC Laporan Gakkumdu; g. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
18	Sri Gde Sentane Aji, SE PKPP Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag PP dan Penyelesaian Sengketa Proses (Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi).	a. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; b. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; c. PIC SPT dan SPJ (perjadin, Kegiatan) Divisi PP Datin; d. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
19	M. Paesel Isro", S.Kom Pratama Komputer Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Hukum, Humas, Datin (Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi).	a. Pengelolaan RAB dan pengajuan RPU (Rencana penarikan Uang) Divisi PP datin b. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota (PPID); c. Pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran d. Menyusun Laporan Akhir PPID; e. Menyusun Bank Data Bawaslu Kabupaten Lombok Timur; f. Operator Srikandi SPT bagian Divisi PP & Datin; g. Operator SPPD bagian Divisi PP & Datin.
20	Debora Aprissa Hutagaol, S.H Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelaksana Teknis CPNS, Subbag Hukum, Humas, Datin (Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa).	a. Pengelolaan RAB dan pengajuan RPU (Rencana penarikan Uang) Divisi Hukum; b. Operator Srikandi SPT bagian Divisi Hukum; c. Operator SPPD bagian Divisi Hukum; d. Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; e. Penyusunan analisis dan kajian hukum; f. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; g. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; h. Menyiapkan Dokumen-Dokumen Hukum Bawaslu; i. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

AKR

21	Lalu Subarja Pratama Putra, S.H. PKPP Ahli Pertama	Pelaksana Teknis PPPK, Subbag Hukum, Humas, Datin (Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa).	a. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum (JDIH) serta Laporan Akhir JDIH; b. Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa; c. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; antarpeserta Pemilihan; d. Pengelolaan SPT dan laporan Perjadin Divisi HPS; e. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa. f. Mengelola SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa).
----	--	---	--

Selong, 07 Juli 2025

Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur



Junaidi, S.Sos

NIP. 19681231 199003 1 079